

Analisis Determinasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan *Prosocial Behaviour* sebagai Moderasi

Novia Larasati¹, Nur Laila Yuliani^{2*}, Betari Maharani³

^{1,2,3} Akuntansi/Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

*email: nurlailay@unimma.ac.id

ABSTRACT

Accountability for managing village funds is very important in being accountable for all activities from planning to accountability to both the community and the local government. This study aims to test empirically and analyze the effect of HR competence, leadership, community participation, and organizational commitment on village fund management accountability with prosocial behavior as a moderating variable. This study used a sample of village officials from the Kaloran District, Temanggung Regency, using a purposive sampling method. The number of samples in this study is 153 respondents. Testing the hypothesis in this study using moderated regression analysis. The results of the study show that community participation has a negative effect on the accountability of managing village funds. Meanwhile, HR competency, leadership, and organizational commitment have no effect on the accountability of managing village funds. Prosocial behavior strengthens the influence of community participation on village fund management accountability. However, prosocial behavior does not moderate the effect of HR competence, leadership and organizational commitment on village fund management accountability.

ABSTRAK

Kata Kunci:
Akuntabilitas;
prosocial
behavior;
kompetensi;
kepemimpinan;
partisipasi
masyarakat

Akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat penting dalam mempertanggungjawabkan segala kegiatan dari perencanaan hingga pertanggungjawaban baik kepada masyarakat maupun pemerintah daerah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh kompetensi SDM, kepemimpinan, partisipasi masyarakat, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan prosocial behaviour sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan sampel perangkat desa se-Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung dengan metode purposive sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 153 responden. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan moderated regression analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan kompetensi SDM, kepemimpinan, dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Prosocial behaviour memperkuat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, prosocial behaviour tidak memoderasi pengaruh kompetensi SDM, kepemimpinan, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang paling dekat dengan masyarakat, dan langsung berhubungan dengan masyarakat. Pemerintahan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang direncanakan bersama. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan seluruh kepentingan dan kebutuhan masyarakat dapat dikelola dengan baik. Pemerintah desa diberikan kesempatan untuk mengelola dana desanya secara mandiri. Hal tersebut merupakan upaya Pemerintah Pusat dalam mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat di seluruh lapisan dan mengurangi ketimpangan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan amanat kepada pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola sumber daya yang dimiliki termasuk dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan yang dimiliki oleh desa. Dengan diberikan wewenang yang semakin luas dalam mengurus rumah tangganya, desa mendapat anggaran dari pemerintah pusat berupa dana desa. Dana Desa merupakan anggaran yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan harus difungsikan untuk kepentingan dan biaya operasional desa. Dana desa yang diberikan merupakan dana yang cukup besar. Peran desa dalam pengelolaan dana sangat besar, maka tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah desa besar pula. Sehingga, pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, di mana seluruh hasil akhir kegiatan penyelenggaraannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang ada (Wijaya, 2018). Besarnya jumlah dana yang harus dikelola memunculkan kekhawatiran berbagai pihak karena rentan akan terjadinya penyelewengan dan pengelolaan yang tidak efektif dan efisien. Sehingga dalam pengelolaan dana desa harus dilakukan secara akuntabel.

Pengelolaan dana desa yang akuntabel merupakan pengelolaan keuangan dimana seluruh kegiatannya harus dipertanggungjawabkan, dan kegiatan tersebut berawal dari rencana penggunaan anggaran, pelaksanaan dan pelaporan kepada masyarakat. Pada tahap perencanaan penganggaran, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus turut andil dalam menyusunnya. Pemerintah desa wajib melakukan kolaborasi. Dengan begitu baru dapat dikatakan bahwa penganggaran yang tersusun mewakili suara dan kepentingan masyarakat. Karena, program kerja dan kegiatan yang disusun harus memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang sekiranya mampu dilakukan sesuai kemampuan pemerintah desa (Wijaya, 2018).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan proses pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang nyata dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat terkait kegagalan maupun keberhasilannya

sebagai bahan untuk evaluasi di tahun-tahun berikutnya. Akuntabilitas tidak sekedar pelaporan keuangan secara formal, namun juga wujud dari janggung jawab atas amanah yang diemban kepada masyarakat dan wujud kepatuhan terhadap peraturan, lingkungan organisasi dan pemerintah (Mahayani, 2017). Hal ini akan memperlihatkan bagaimana kinerja perangkat desa dalam mengemban amanah untuk mengelola dana desa tersebut yang berguna untuk menyejahterkan masyarakat desa dan meratakan pembangunan. Akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa merupakan suatu indikasi bahwa desa tersebut merupakan desa yang berkeadilan dan demokratis. Pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa harus menerapkan prinsip tata kelola yang akuntabel yaitu pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan (Widiawati et al., 2022).

Jumlah dana desa yang disalurkan di Kecamatan Kaloran cukup besar dan termasuk kedalam kategori penerimaan dana desa no 4 besar. Namun, belum mencerminkan tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah baik, karena masih terdapat keterlambatan pencairan dana. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan perangkat desa di wilayah Kaloran keterlambatan dalam pengumpulan laporan pengelolaan dana desa, dikarenakan oleh tingkat pendidikan perangkat desa, kurang maksimalnya perangkat desa dalam bekerja, umur perangkat desa dan kurangnya pemahaman aparat desa yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa, Hal tersebut didukung dengan data bahwa hampir dari setengah perangkat desa yang ada di Kecamatan Kaloran adalah lulusan SMA dengan presentase 46,15% dari jumlah keseluruhan perangkat desa yang ada. Tingkat pendidikan ini dapat berpengaruh dalam pembuatan laporan dana desa, sehingga dapat menyebabkan keterlambatan pelaporan dan pencairan dana menjadi terhambat. Pencairan dana terhambat karena untuk mencairkan dana desa dibutuhkan laporan dana desa tahun sebelumnya.

Menurut Abidin (2015) penyebab terjadinya penyelewengan dipicu oleh kurangnya pengetahuan aparatur desa dalam tata kelola dan pelaporan keuangan. Jajaran perangkat desa yang berkompeten disinyalir dapat mengurangi tingkat penyelewengan atau korupsi yang mungkin terjadi dalam penggunaan dana desa. Syarat utama akuntabilitas dana desa yang baik salah satunya adalah tingkat kompetensi aparat desa dalam pengelola dana desa. Kompetensi yang dimiliki oleh seseorang atau aparat desa juga dapat dilihat sebagai kemampuan untuk dapat mencapai tujuan kerjanya. Semakin bagus kualitas kompetensi aparat desa maka akuntabilitas pengelolaan dana desa semakin tinggi. Berdasarkan penelitian Aziiz (2019), Sapartiningsih et al. (2018), dan Umaira & Adnan (2019), bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian Harahap et al. (2020), Widayatama et al. (2017) menunjukkan kompetensi sumber daya pengelola tidak memiliki pengaruh dalam meningkatkan akuntabilitas. Hal tersebut terjadi karena kurang efektifnya sistem pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah

kecamatan dan pemerintah kabupaten kepada pihak terkait yakni pengelola di tingkat desa, dan tingkat pendidikan aparat desa yang rendah.

Gaya kepemimpinan merupakan salah satu indikator dari kualitas kepala desa. Kesuksesan dan kegagalan organisasi ditentukan oleh banyak hal diantaranya ketrampilan pemimpin dalam menjalankan roda organisasi. (Fathoni, 2014). Apabila kepala desa beserta jajarannya memiliki kepekaan dalam menganalisis kebutuhan dan kepentingan masyarakat, maka akan memicu simpati dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dan program pemangunan dalam rangka memajukan desa. Terlebih jika kepala desa juga membangun pola komunikasi yang baik memiliki etos kerja. Berdasarkan hasil penelitian Dewi & Gayatri (2019), Fathoni (2014), dan Nafsiah & Diana (2020) bahwa kepemimpinan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kepemimpinan kepala desa merupakan pemicu motivasi dan etos kerja bawahan dalam melaksanakan program dan telah dicanangkan oleh pemerintah desa. Kepala desa juga harus mengawasi dan bertanggungjawab atas semua kegiatan di desa. Kepala desa juga akan berkoordinasi dengan aparat desa, dimana aparat desa akan melaporkan semua hasil kegiatan kepada kepala desa. Akan tetapi, hasil penelitian Mahayani (2017) menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut disebabkan karena dana desa telah ditangani oleh badan pelaksana pengelolaan dana desa, sehingga tim pengelola sudah terbentuk dan sudah mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing. Oleh karena itu, peran kepemimpinan tidak mempengaruhi akuntabilitas.

Partisipasi masyarakat disinyalir dapat mengurangi munculnya masalah yang mungkin terjadi dalam pengelolaan, salah satunya dapat mengurangi adanya kecurangan. Semakin tinggi individu yang ikut serta di dalamnya, maka semakin tinggi rasa tanggung jawab pengelola dalam menganggar dan membelanjakan dana desa tersebut sehingga akuntabilitas akan tercapai. Berdasarkan penelitian Dewi & Gayatri (2019), Harahap et al. (2020), Mahayani (2017), dan Umaira & Adnan (2019) menghasilkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelola dalam membelanjakan dana desa. Akan tetapi, penelitian Nafsiah & Diana (2020) menyangkal bahwa sikap pro aktif masyarakat tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Komitmen organisasi hendaknya menjadi sebuah *soft skill* yang senantiasa ditanamkan dalam setiap aparat desa, karena adanya komitmen yang tertanam dalam diri, maka dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap organisasi dan akan melakukan segala hal demi memajukan organisasi. Jika jiwa komitmen telah tumbuh, maka anggota organisasi tentu akan menunjukkan tingkat keikutsertaan yang tinggi dalam organisasi sehingga dapat menciptakan akuntabilitas dalam mengelola alokasi dana desa. Pendapat ini dilandaskan pada penelitian Mada et al. (2017), Masruhin & Kaukab (2019), Muallifu et al. (2019), dan Tarjo (2019) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi yang tinggi

akan meningkatkan indeks akuntabilitas. Oleh karena itu, aparat desa yang memiliki komitmen tinggi akan menciptakan akuntabilitas yang tinggi dalam proses pengelolaan dana desa.

Prosocial behaviour merupakan sikap yang gemar menolong dan pengabdian diri yang ikhlas tanpa mengharapkan imbalan yang bersifat material. Perilaku prososial adalah senantiasa mensupport orang lain, berasas kerja sama, mengedepankan solidaritas dan suka menolong tanpa mengharapkan imbalan. *Prosocial behaviour* bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan orang lain. Dana desa dianggarkan salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pembangunan ekonomi, sehingga apabila kepala desa serta aparat desa yang mengelola keuangan desa memiliki perilaku prososial tersebut maka dapat terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Segi kepemimpinan, apabila kepala desa serta aparat desa bisa berinteraksi dan bekerja sama dengan baik, maka lebih mudah dalam mencapai tujuan, dan menciptakan akuntabilitas. Berdasarkan penelitian Mahayani (2017), dan Wadi & Furkan (2020) bahwa *prosocial behaviour* memiliki pengaruh dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut karena adanya jiwa sosial yang terdapat dalam diri aparat akan dapat mencapai tujuan bersama dalam organisasi.

Penelitian ini mengembangkan dari penelitian Mahayani (2017) dengan menambahkan variabel Komitmen Organisasi, karena apabila dalam suatu organisasi tidak ada suatu komitmen maka akan sulit untuk mencapai suatu tujuan, salah satunya untuk mewujudkan akuntabilitas. Sebagaimana penelitian Mada et al. (2017) mengatakan bahwa komitmen organisasi memiliki andil yang cukup besar dalam mengembangkan akuntabilitas dalam mengelola dana desa. Tingginya komitmen organisasi akan memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kinerja aparat desa. Komitmen satu senjata yang ampuh untuk mencapai tujuan organisasi. Karena, komitmen organisasi langsung menysasar pada aspek psikologis aparat dalam kata lain menyentuh hatinya, untuk secara tulus dan ikhlas menjalankan pekerjaan. Apabila kondisi tersebut telah ada dalam diri pengelola dana desa, maka akuntabilitas dapat meningkat. Komitmen organisasi dapat ditunjukkan melalui loyalitas, semangat kerja, dan rasa memiliki terhadap organisasi. Semakin rendah seseorang memiliki komitmen dalam berorganisasi maka menunjukkan rendahnya tanggung jawab seseorang dalam pekerjaannya (Tarjo, 2019).

Motivasi penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis objek penelitiannya dilakukan di Kecamatan Kaloran. Penelitian dilakukan di Kecamatan Kaloran karena masih terdapat beberapa desa dalam pengumpulan laporan dana desanya terlambat. Diantara faktor penyebabnya adalah aparat desa yang kurang memiliki etos kerja, kinerja yang menurun, serta pengalaman

yang kurang dan rendahnya pengetahuan yang dimiliki. Keterlambatan pelaporan ini menyebabkan keterlambatan pencairan dana, karena dalam pencairan dana harus melaporkan pengelolaan dana desa pada tahun sebelumnya. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

METODE

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pengelola dana desa se Kecamatan Kaloran. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*, adapun kriteria sampel yang digunakan meliputi:

1. Perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kaur, kasi, dan kepala dusun yang merupakan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.
2. Anggota BPD yaitu Ketua dan Wakil Ketua.
3. Memiliki masa kerja minimal 2 tahun dan tingkat pendidikan SMP/SLTP sederajat.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional variabel berdasarkan literature dan kajian penelitian terdahulu. Untuk pengukuran variabel menggunakan skala likert 5 poin dari 1 sangat tidak setuju sampai dengan 5 sangat setuju. Uraian definisi operasional dan pengukuran variabel dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Definisi operasional dan pengukuran variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan terkait dengan pengelolaan dana desa kepada pihak yang memberikan wewenang (Mardiasmo, 2010)	Menggunakan 6 pernyataan yang mengacu pada penelitian Mada et al. (2017) dengan indikator: a. Kejujuran dan keterbukaan informasi b. Kepatuhan dalam pelaporan c. Kesesuaian prosedur d. Kecukupan informasi e. Ketepatan penyampaian laporan
Kompetensi Sumber Daya Manusia	Kompetensi sumber daya manusia merupakan karakteristik dari seseorang yang memiliki pengetahuan, kemampuan,	Menggunakan 6 pernyataan yang mengacu pada penelitian Mada et al. (2017) dengan indikator: a. Pengetahuan

Variabel	Definisi	Pengukuran
Kepemimpinan	dan keterampilan dalam melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005). Kepemimpinan merupakan cara seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi (Hasibuan, 2013).	b. Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan c. Keahlian teknis d. Kemampuan mencari solusi e. Inisiatif dala bekerja f. Keramahan dan kesopanan Menggunakan 4 pernyataan yang mengacu pada penelitian (Naelavika et al., 2018) dengan indikator: a. Kemampuan mengarahkan serta mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya b. Dukungan serta bimbingan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugasnya
Partisipasi Masyarakat	Partisipasi merupakan bekerjanya suatu sistem pemerintahn dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat (Juliantara, 2002).	Menggunakan 5 pernyataan yang mengacu pada penelitian Mada et al. (2017) dengan indikator: a. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan program-program desa b. Mengusulkan rencana anggaran c. Terlibat dalam mrampat paripurna d. Terlibat mengawasi dan melaporkan e. Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran f. Memberikan penghargaan
Komitmen Organisasi	Andrianto dalam (Alminanda & Marfuah, 2018) menjelaskan bahwa, komitmen organisasi dibangun atas dasar kepercayaan pegawai atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pegawai membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi.	Menggunakan 5 pernyataan yang mengacu penelitian Mada et al. (2017) dengan indikator: a. Keyakinan terhadap tujuan organisasi b. Perasaan memiliki organisasi c. Mempertahankan keanggotaan organisasi d. Kesetiaan dalam organisasi e. Kesiediaan mengarahkan upaya atas nama organisasi
Prosocial Behaviour	Taylor et al (2009) menjelaskan bahwa, <i>prosocial behaviour</i> mencakup tindakan menolong atau tindakan yang dirancang untuk	Menggunakan 5 pernyataan yang mengacu pada penelitian Asih & Pratiwi (2010) dengan indikator: a. Berbagi b. Kerjasama c. Menolong

Variabel	Definisi	Pengukuran
	menolong terlepas dari motif si penolong.	d. Bertindakjujur e. Berderma

Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini terdiri dari statistik deskriptif, uji validitas, dan uji reliabilitas, dan *moderated regression analysis*. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan *confirmantory factor analysis* (CFA), dengan kriteria *Kaiser-Meyer-Olkin of Sampling Adequacy* (KMO MSA) dan *cross loading* >0,50. Sedangkan untuk uji reliabilitas dengan menghitung *conbach's alpha*, dengan kesimpulan konstruk dikatakan reliable jika nilai *conbach's alpha* >0,70. Pengaruh moderasi dilihat menggunakan *moderated regression analysis* dengan menggunakan $\alpha=5\%$ (Ghozali, 2018). Adapun persamaan regresi yang digunakan penelitian ini sebagai berikut:

$$APDD = a + \beta_1 KSDM + \beta_2 K + \beta_3 PM + \beta_4 KO + \beta_5 KSDM * PB + \beta_6 K * PB + \beta_7 PM * PB + \beta_8 KO * PB + e$$

Keterangan:

APDD = Aakuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

KSDM= Kompetensi Sumber Daya Manusia

K = Kepemimpinan

PM = Partisipasi Masyarakat

KO = Komitmen Organisasi

PB = *Prosocial Behaviour*

α = Konstanta

β_{1-8} = Koefisien Regresi

e = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Diskriptif

Hasil pengujian statistik deskriptif yang dilakukan menunjukkan bahwa rata-rata responden menjawab 4 atau setuju. Hasil uji statistic diskriptif dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Minim um	Maxim um	Mean	Std. Deviation
Kompetensi SDM	153	3	5	4	0,37018
Kepemimpinan	153	3	5	4	0,45661
Partisipasi Masyarakat	153	3	5	4	0,48619
Komitmen Organisasi	153	3	5	4	0,49377
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	153	3	5	4	0,42612
<i>Prosocial Behaviour</i>	153	3	5	4	0,43283

Sumber: Data primer yang diolah

Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas memberikan hasil nilai *cross loading* per butir pernyataan >0,50, sehingga pernyataan kuesioner dinyatakan valid. Namun terdapat 2 pernyataan yang tidak valid dan tidak digunakan dalam analisis berikutnya. Untuk uji reliabilitas diperoleh nilai *conbach's alpha* >0,7 yang berarti bahwa pernyataan penelitian dinyatakan reliabel. Hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	Croanbach Alpha	Keterangan
Kompetensi SDM	0,744	Reliabel
Kepemimpinan	0,866	Reliabel
Partisipasi Masyarakat	0,800	Reliabel
Komitmen Organisasi	0,822	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,869	Reliabel
<i>Prosocial Behaviour</i>	0,878	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah

Moderated Regression Analysis

Moderated regression analysis digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan adanya variabel moderating. Hasil *moderated regression analysis* dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,920	0,358		5,359	0,000
Kompetensi SDM (KSDM)	0,189	0,668	,164	0,283	0,778
Kepemimpinan (K)	0,975	0,743	1,045	1,313	0,191
Partisipasi Masyarakat (PM)	-2,140	0,549	-2,441	-3,896	0,000
Komitmen Organisasi (KO)	1,110	0,671	1,287	1,656	0,100
KSDM* <i>Prosocial Behaviour</i>	-0,047	0,145	-,332	-0,325	0,746
K* <i>Prosocial Behaviour</i>	-0,177	0,169	-1,471	-1,048	0,296
PM* <i>Prosocial Behaviour</i>	0,522	0,119	4,123	4,385	0,000
KO* <i>Prosocial Behaviour</i>	-0,199	0,150	-1,695	-1,325	0,187

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada tabel 4 maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$APDD = 1,920 + \beta_1 0,189 + \beta_2 0,975 - \beta_3 2,140 + \beta_4 1,110 - \beta_5 0,047 - \beta_6 0,177 + \beta_7 0,522 - \beta_8 0,199 + e$$

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi memberikan hasil *adjusted R²* sebesar 0,66. Hasil tersebut menunjukkan bahwa persentase kompetensi sumber daya manusia, kepemimpinan, partisipasi masyarakat dan komitmen organisasi memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 66% dan sisanya 34% dipengaruhi oleh variabel di luar model. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,824 ^a	0,678	0,660	0,24830

Sumber: Data primer yang diolah

Uji F

Pengujian ini digunakan untuk melihat kelayakan model pada penelitian ini. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini fit atau layak. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Uji F

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	18,723	8	2,340	37,961	0,000 ^b
Residual	8,878	144	0,062		
Total	27,600	152			

Sumber: Data primer yang diolah

Uji t

Tabel 7. Uji t

Model	thitung	t_{tabel}	Sig.	Kesimpulan
Kompetensi SDM (KSDM)	0,283	1,65494	0,778	H1 Tidak Diterima
Kepemimpinan (K)	1,313	1,65494	0,191	H2 Tidak Diterima
Partisipasi Masyarakat (PM)	-3,896	1,65494	0,000	H3 Tidak Diterima
Komitmen Organisasi (KO)	1,656	1,65494	0,100	H4 Tidak Diterima
KSDM* <i>Prosocial Behaviour</i>	-0,325	1,65494	0,746	H5 Tidak Diterima
K* <i>Prosocial Behaviour</i>	-1,048	1,65494	0,296	H6 Tidak Diterima
PM* <i>Prosocial Behaviour</i>	4,385	1,65494	0,000	H7 Diterima
KO* <i>Prosocial Behaviour</i>	-1,325	1,65494	0,187	H8 Tidak Diterima

Sumber: Data primer diolah 2021

Pembahasan

1. Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya bahwa baik atau tidaknya kompetensi SDM tidak berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut dikarenakan penyusunan laporan keuangan dikerjakan oleh sistem komputer. Petugas pengelola tidak perlu bersusah payah untuk melakukan operasi akuntansi dalam menghitung dan menyusun laporan. Sehingga, tingkat kompetensi SDM tidak berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Alminanda & Marfuah, 2018). Pengelola dalam hal ini hanya bertugas melakukan input data. Dengan adanya sistem, pengelola tidak terlalu dalam melakukan olah akuntansi karena semua telah dilakukan oleh sistem. Hal lainnya yang mungkin terjadi yaitu dari pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang terkadang dapat disalahgunakan, dan tidak melaporkan pertanggungjawaban sesuai pada kenyataan yang terjadi. Pengetahuan yang dimiliki dan pelatihan teknis terkadang hanya sebatas mengetahui tanpa diterapkan, sehingga dalam penyusunan laporan hanya sebatas pada laporan tersebut dapat digunakan untuk pelaporan, dan menghiraukan peraturan serta prosedur penyusunan yang sudah ditetapkan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa kompetensi SDM dapat mengurangi terjadinya asimetri informasi karena agen berjalan dengan menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin agen bertindak untuk kepentingan *principal* dalam menciptakan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Saat ini walaupun aparat tidak mengetahui bidang akuntansi tetap dapat melaporkan penggunaan keuangan karena aparat yang bertanggung jawab hanya menginput data yang akan dilaporkan. Sehingga, kompetensi aparatur desa tidak mempengaruhi asimetri informasi yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian konsisten dengan penelitian Alminanda & Marfuah (2018) dan Harahap et al. (2020) yang menunjukkan bahwa kompetensi SDM tidak memiliki kontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun tidak konsisten dengan penelitian Aziiz (2019), Mahayani (2017), dan Pramayoga & Ramantha (2020) yang memberikan hasil adanya hubungan yang positif antara kompetensi SDM dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Pengaruh Kepemimpinan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak memiliki dampak terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya bahwa baik atau tidaknya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut terjadi karena dalam pengelolaan telah dibentuk suatu tim yang menangani urusan keuangan dana desa. Tim beranggotakan beberapa perangkat desa yang telah memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. Sehingga peran kepemimpinan kepala

desa tidak memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Mahayani, 2017). Apabila pemimpin yang memberikan contoh, arahan, serta motivasi kepada bawahan secara agresif dapat mengakibatkan bawahan menjadi tidak menghiraukan pemimpin dan tidak dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jadi, meskipun pemimpin mampu melaksanakan tugas, tanggap dalam permasalahan, serta dapat memberikan arahan kepada bawahan tidak akan memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian tidak sejalan dengan teori agensi, hubungan antara agen dan principal dapat terjadi asimetri informasi. Kepemimpinan yang baik adalah upaya untuk meminimalisir asimetri informasi yang dapat dilakukan dengan cara *bonding cost*. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan contoh dan motivasi kepada bawahan. Pemimpin yang memberikan motivasi dan dorongan kepada bawahannya secara agresif dapat membuat bawahan menjadi tertekan dan malas untuk memperhatikan pimpinan. Sehingga karyawan tidak menjalankan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan, bahkan dapat menjadikan seseorang bekerja dengan semau hati. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Mahayani (2017) yang memberikan hasil bahwa kepemimpinan tidak memiliki dampak dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Dewi & Gayatri (2019), Nafsiah & Diana (2020), dan Pramayoga & Ramantha (2020) yang menyatakan bahwa kepemimpinan memiliki peran dalam meningkatkan akuntabilitas.

3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh negative terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya bahwa semakin banyak partisipasi masyarakat akan menurunkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut terjadi karena dengan banyaknya partisipasi masyarakat dapat menghambat dalam hal pengambilan keputusan, seperti adanya pertentangan antar kelompok masyarakat yang dapat menghambat atau bahkan menunda dalam pengambilan keputusan (Kartika, 2012). Adanya partisipasi masyarakat yang agresif juga dapat berpengaruh terhadap kinerja aparat desa, masyarakat yang terlalu ingin ikut campur dalam pengelolaan dana desa dapat membuat kinerja aparat desa menurun, sehingga tidak akan tercapai pengelolaan dana desa yang akuntabel.

Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan teori agensi yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat mengurangi asimetri informasi sehingga dapat mempengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat yang tinggi adalah upaya untuk menurunkan tingkat asimetri informasi yang ada dengan metode *monitoring cost*. Upaya yang dilakukan masyarakat yaitu dengan adanya wakil dari suara masyarakat untuk mengikuti rapat pembahasan anggaran desa, dan

memberikan saran untuk alokasi dana desa. Namun masukan serta saran yang diusulkan oleh masyarakat kembali lagi kepada ketentuan serta peraturan yang sudah ditetapkan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Nafsiah & Diana (2020) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Atiningsih & Ningtyas (2019), Harahap et al. (2020), dan Mahayani (2017) yang hasil penelitiannya mengatakan jika masyarakat berpartisipasi aktif dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan dana desa maka, akan meningkatkan akuntabilitas.

4. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian dalam penelitian ini membuktikan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya bahwa berkomitmen atau tidak perangkat desa tidak memberikan perubahan yang signifikan pada akuntabilitas. Hal tersebut terjadi karena komitmen organisasi yang menjelaskan bahwa dalam komitmen organisasi, aparat harus peduli terhadap tanggung jawab yang telah diberikan dalam tugas mengelola dana desa. Namun hal tersebut hanya sebatas tugas pokok dan fungsinya dijalankan tanpa mengedepankan akuntabilitas pengelolaan dana desa seperti harus menyajikan laporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan hal tersebut maka komitmen organisasi tidak memiliki andil dalam peningkatan ataupun penurunan akuntabilitas dalam mengelola dana desa.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi, bahwa komitmen organisasi dapat mengurangi asimetri informasi dalam pengelolaan dana desa. Tingkat komitmen terhadap organisasi tidak dapat mengurangi asimetri informasi karena dalam menjalankan tugasnya tidak selalu mengedepankan ketentuan dan peraturan yang berlaku, namun hanya sekedar memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Marsoit et al. (2017) yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Tarjo (2019) dan Mada et al (2017) yang menunjukkan hasil bahwa komitmen organisasi tidak ada pengaruhnya dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

5. *Prosocial Behaviour* Memoderasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa *prosocial behaviour* tidak memoderasi pengaruh kompetensi SDM terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya, adanya perilaku prososial tidak dapat memperkuat pengaruh kompetensi SDM terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut terjadi karena perilaku prososial dapat membuat individu lebih mengutamakan urusan orang lain dari pada diri sendiri. Hal tersebut dapat menyebabkan individu mengesampingkan apa yang telah menjadi urusan dan tanggung jawabnya, sehingga, tidak dapat mencapai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Mahayani (2017) juga menjelaskan bahwa aparat yang memiliki

perilaku prososial justru lebih memprioritaskan kegiatan sosial dan cenderung menomorduakan masalah pengelolaan dana desa yang ujungnya menyebabkan pengelolaan terbengkalai dan menurunkan akuntabilitas.

Hasil penelitian tidak sejalan dengan *theory of reasoned action* yang menjelaskan bahwa dalam berperilaku dan pengambilan keputusan harus didasari dengan evaluasi dampak yang akan diterima dan memikirkan persepsi orang lain atas perilaku yang dilakukan. Sehingga perilaku prososial yang didasari dengan keyakinan serta evaluasi atas keputusan yang akan dilakukan dengan kompetensi yang dimiliki dapat menyebabkan banyak pertimbangan dan terlalu lama memikirkan dalam pengambilan keputusan serta perilaku yang akan dilakukan. Sehingga dengan hal tersebut dapat menghambat akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Mahayani (2017) yang memberikan hasil bahwa *prosocial behaviour* memperlemah kompetensi SDM dan mengakibatkan menurunnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Serta penelitian Wadi & Furkan (2020) yang menunjukkan hasil bahwa *prosocial behaviour* memperkuat pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

6. *Prosocial Behaviour* Memoderasi Pengaruh Kepemimpinan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa *prosocial behaviour* tidak memoderasi pengaruh kepemimpinan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut terjadi karena dalam pengelolaan dana desa sudah terbentuk suatu tim, jadi dalam hal ini peran pemimpin tidak memberikan sumbangsih yang besar terhadap akuntabilitas (Mahayani, 2017). Hal lain apabila pemimpin berperan dalam mempengaruhi bawahan, namun pemimpin lebih mementingkan kegiatan sosial, daripada melakukan kegiatan yang telah dibebankan kepadanya, maka akan menurunkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian tidak sejalan dengan *theory of reasoned action*, yang menjelaskan bahwa perilaku prososial yang ada dalam diri pemimpin harus didasari oleh keyakinan dan evaluasi dari hasil yang akan timbul atas perilaku yang dilakukan, serta memikirkan persepsi orang lain atas perilaku yang diperbuat memperlemah pengaruh kepemimpinan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut dikarenakan apabila pemimpin lambat dalam membuat suatu keputusan yang disebabkan lambatnya dalam meyakinkan dan evaluasi dari dampak yang akan diterima kedepannya dapat menghambat tercapainya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Mahayani (2017) yang menunjukkan bahwa *prosocial behaviour* memperlemah pengaruh kepemimpinan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Serta penelitian yang dilakukan oleh Wadi & Furkan (2020) yang menunjukkan bahwa *prosocial behaviour* mampu mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

7. *Prosocial Behaviour* Memoderasi Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa *prosocial behaviour* memperkuat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya bahwa perilaku prososial dan sikap proaktif masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut terjadi karena simpati masyarakat yang tinggi dengan diimbangi dengan sikap bekerja sama dari partisipan dapat meningkatkan etos kerja aparat desa dalam mengelola dana desa sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut Mahayani (2017) adanya peran masyarakat yang diimbangi dengan perilaku kerjasama yang dibangun akan mencapai suatu keberhasilan bersama.

Hasil penelitian sejalan dengan *theory of reasoned action*, bahwa partisipan yang memiliki perilaku prososial yang diimbangi dengan keyakinan serta evaluasi atas konsekuensi yang akan didapatkan atas perilaku yang diperbuat maka dapat menciptakan akuntabilitas pengelolaan desa. Hal ini dikarenakan adanya partisipasi masyarakat yang diperkuat adanya perilaku prososial yang memikirkan konsekuensi yang akan terjadi dalam pembuatan keputusan serta perilaku dapat membuat aparat menjadi lebih bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa, sehingga dapat tercipta akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Mahayani (2017) yang menyatakan bahwa *prosocial behaviour* memperkuat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, hasil penelitian ini kontra dengan penelitian Nafsiah & Diana (2020) bahwa *prosocial behaviour* tidak memiliki andil dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

8. *Prosocial Behaviour* Memoderasi Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa *prosocial behaviour* tidak memoderasi pengaruh kompetensi SDM terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya bahwa adanya perilaku prososial tidak dapat memperkuat pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut terjadi karena perilaku prososial yang terdapat dalam diri aparat pengelola dana desa dapat memunculkan sikap lebih mengedepankan kepentingan sosial kemasyarakatan dibandingkan dengan kepentingan organisasi. Hal ini akan menjadikan aparat pengelola dana desa melakukan kegiatan diluar tugas pokok mereka sehingga tidak dapat mencapai akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian tidak sejalan dengan *theory of reasoned action* yang menjelaskan bahwa perilaku prososial yang diimbangi dengan keyakinan serta evaluasi terhadap dampak yang akan terjadi kemudian justru akan memperlemah pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut dikarenakan ketika dalam memutuskan suatu keputusan, aparat pengelola dana desa berpikir terlalu lama

serta setelah evaluasi hasil dari keputusan yang akan diambil tersebut menjadi lebih banyak pertimbangan, dan menjadikan kebimbangan dalam diri aparat pengelola dana desa sehingga sulit untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunarno & Liana (2015) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa prosocial behaviour tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wadi & Furkan (2020) yang menunjukkan bahwa prosocial behaviour mampu mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan hasil bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan kompetensi SDM, kepemimpinan dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *prosocial behaviour* memperkuat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan *prosocial behaviour* tidak memoderasi pengaruh kompetensi SDM, kepemimpinan, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel seperti Sistem Keuangan Desa, hal ini karena siskeudes ini merupakan upaya peningkatan kualitas tata kelola keuangan pemerintah desa sebagai konsekuensi dari desentralisasi fiskal. Siskeudes menjadi alat bagi pemerintah desa dalam melakukan pelaporan keuangan desa yang terintegrasi dan terkomputerasi sehingga akan meminimalkan tindak penyimpangan sehingga akan semakin akuntabel (Arfiansyah, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 61–76.
- Alminanda, P., & Marfuah, M. (2018). Peran Komitmen Organisasi Dalam Memoderasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 16(2), 117–132. <https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v16i2.2620>
- Asih, G. Y., & Pratiwi, M. M. S. (2010). Perilaku Prosocial Ditinjau Dari Empati Dan Kematangan Emosi. *Jurnal Psikologi Universitas Muria Kudus*, 1(1), 33–42. http://eprints.umk.ac.id/268/1/33_-_42.PDF
- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 2015–2019.

- Aulia, P. (2018). Pengaruh kompetensi aparat pengelolaan dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten 50 Kota. *JOM FEB*, 1, 1–15.
- Aziiz, M. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>
- Baron, R. A., & Byrne, D. (2005). *Psikologi Sosial*. Erlangga.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga.
- Behnam, M., & MacLean, T. L. (2011). Where Is the Accountability in International Accountability Standards?: A Decoupling Perspective. *Business Ethics Quarterly*, 21(1), 45–72. <https://doi.org/10.5840/beq20112113>
- Blanchard, P. N., & James, W. T. (2004). Effective Training: System, Strategies, and Practices. In *Second Edition*. Prentice Hall.
- Brown, L. D., & Moore, M. H. (2010). *Privacy by Design: Essential for Organizational Accountability and Strong Business Practices*. 405–413.
- Davis, K. (2000). Perilaku Dalam Organisasi. In *Edisi Ketujuh*. Erlangga.
- Dayaksini, T., & Hudaniah. (2009). *Psikologi Sosial*. UMM PRESS.
- Devas, N., & Grant, U. (2003). Local Government Decision Making Citizen Participation and Local Accountability: Some Evidence from Kenya and Uganda. *Public Administration and Development*, 307–316.
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1269. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p16>
- Fathoni, M. (2014). Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi Di Desa Denok Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 3(1), 139–146.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, attitude, intention, and behaviour: An introduction to theory and research*. Addison-Wesley Publishing Company.
- Frink, D. D., & Klimoski, R. J. (2004). Advancing accountability theory and practice: Introduction to the human resource management review special edition. *Human Resource Management Review*, 14(1), 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2004.02.001>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Griffin. (2004). *Komitmen Organisasi*. Erlangga.
- Harahap, F. B., Junita, A., & Meutia, T. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Partisipasi Masyarakat, dan Perilaku Kepemimpinan terhadap Pengelolaan Dana Desa dengan Komitmen pada Tujuan sebagai Variabel Moderasi. 5(1), 278–287.
- Hasibuan, M. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Hevesi, A. G. (2005). *Standarts for Internal Control in New York State Government* (Issue October).
- Hullah, A. R., Pangemana, S., Tangkuman, S., & Budiarmo, N. (2012). Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 3, 9–21.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior,

- Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 305–360.
- Juliantara, D. (2002). *Pembaruan Desa: Bertumpu pada Apa yang Terbawa*. Lapera Pustaka Utama.
- Kartika, R. S. (2012). Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja*, 04(03), 179–188. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.179-188>
- Kartono, K. (1982). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kartono, K. (2003). *Kamus Psikologi*. Pionir Jaya.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Mahayani, N. L. A. (2017). Prosocial Behavior Dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 129. <https://doi.org/10.24843/jiab.2017.v12.i02.p07>
- Mardiasmo. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. CV. Andi Offset.
- Marsoit, P., Sendow, G., & Rumokoy, F. (2017). the Effect of Training, Work Discipline and Organization Commitment To Performance Employee At Pt. Asuransi Jasa Indonesia. *Jurnal EMBA*, 5(3), 4285–4294. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/18393>
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 106–123. <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8364>
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 118–130.
- Mowday, R. T., Steers, R. M., & Porter, L. W. (1979). The Measurement of Organizational Commitment. *Journal of Vocational Behaviour*, 14(2).
- Mualifu, Guspul, A., & Hermawan. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 49–59.
- Muslimin, M., Mappamiring, M., & Nurmaeta, S. (2012). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 79–85. <https://doi.org/10.26618/ojip.v2i1.43>
- Mussen, P. H., Conger, J. J., & Kagan, J. (1989). *Child Development and Personality*. Harper and Row Publisher.
- Naelavika, Hafidhah, & Herli, M. (2018). *Pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan kangayan*. 1–17.
- Nafsiah, S. N., & Diana, M. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Indralaya. *Jurnal Ilmiah Bina*

- Manajemen*, 3(2), 104–112.
- Nainggolan, F. A. (2018). Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Ramunia Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 1–9.
- Nordiawan, D. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). Agency theory: Review of theory and evidence on problems and perspectives. *Indian Journal of Corporate Governance*, 10(1), 74–95. <https://doi.org/10.1177/0974686217701467>
- Pramayoga, I. B., & Ramantha, I. W. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa, dan Kepemimpinan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 30, 226–237.
- Purnamawati, I. G. A., & Adnyani, N. K. K. S. (2019). Peran Komitmen, Kompetensi, Dan Spiritualitas Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 227–240. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10013>
- Robbins, S. P., & Timothy, A. J. (2008). *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat.
- Sapartiningsih, D., Suharno, & Kristianto, D. (2018). Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 14(1 Maret), 100–114.
- Sears, D. O., Freedman, J. L., & Peplau, L. A. (1991). *Psikologi Sosial Jilid 2*. Erlangga.
- Sekaran, U. (2006). *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat.
- Septarini, D. F., & Papilaya, F. (2016). Interaksi komitmen organisasi terhadap faktor faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, VII, 100–116.
- Silva, A. (2016). What is Leadership ? Video : What is leadership ? *Journal of Business Studies Quarterly*, 8(1), 1–5. <https://search.proquest.com/openview/da932f3ddd496ce36e7f30f9e133b141/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1056382>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press.
- Sunanto, E., & Ismanudin. (2018). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Bidang Layanan Sipil Di Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. 16(2), 202–229.
- Sunarno, & Liana, L. (2015). Pengaruh Komitmen Organisasional Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Guru Dimediasi Kepuasan Kerja (Studi Kasus Pada Guru Sma Kesatrian Dalam Yayasan Pendidikan Kesatrian. *Pengaruh Harga Diskon Dan Persepsi Produk Terhadap Nilai Belanja Serta Perilaku Pembelian Konsumen*, 7(9), 27–44.
- Tarjo. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Dana Desa (Studi pada Desa Muara Niro Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo). *Jurnal Tata S*, 5(2).

- Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2009). Psikologi Sosial. In *Edisi Kedua Belas*. Kencana Prenada Media Group.
- Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471–481. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580>
- Wadi, I., & Furkan, L. M. (2020). *Pengaruh Norma Subyektif, Kinerja Aparatur, Kejelasan Sasaran Anggaran, Prosocial Behavior Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas*. 3, 101–114.
- Widiawati, D., Yuliani, N. L., & Purwantini, A. H. (2022). Analysis of Determinants on Village Fund Management Accountability. *Urecol Journal. Part B: Economics and Business*, 2(1), 9–19.
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20. <https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762>
- Wijaya, D. (2018). *Akuntansi Desa*. Penerbit Gava Media.
- Yukl, G. (2016). *Leadership in Organizations*. Pearson.
- Yuliani, L., Dwikurnaningsih, Y., & . S. (2019). Meningkatkan Perilaku Prosocial melalui Layanan Bimbingan Kelompok dengan Menggunakan Teknik Permainan (Games) pada Anak Asrama Sion Salatiga. *Jurnal Pedagogi Dan Pembelajaran*, 2(1), 33. <https://doi.org/10.23887/jp2.v2i1.17605>
- Zeyn, E. (2011). Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan. *Trikonomika*, 10(1), 52–62.